

POLICY BRIEF

STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI PERTANIAN



**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020**

Policy Brief

STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI PERTANIAN

Pendahuluan

- Pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian sangat penting, khususnya di masa pandemi COVID-19. Peningkatan investasi komoditas pertanian tertentu menjadi bagian penting dalam melihat prospek perkembangan usaha pertanian. Namun demikian, agar semakin banyak minat berinvestasi dibutuhkan persiapan yang matang mengingat saat ini dalam proses transisi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
- Beberapa pertimbangan dalam meningkatkan investasi adalah gejolak ekonomi global, seperti perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok maupun pandemi COVID-19. Pengalaman saat krisis ekonomi 1998 secara signifikan menyebabkan penurunan investasi asing. Pemerintah harus mengimbangi dampak negatif kejadian global dengan kebijakan investasi di dalam negeri yang lebih akomodatif terhadap investor asing.

Permasalahan

- Kebijakan dan strategi peningkatan investasi pertanian memerlukan keberpihakan dan dukungan konkret dari seluruh elemen bangsa, khususnya para pengambil kebijakan. Diperlukan sinkronisasi kebijakan multisektor baik dari lingkup Kementan maupun non-Kementan, khususnya terhadap investasi swasta.
- Berdasarkan uraian di atas diharapkan pemerintah terus berupaya menggairahkan penanaman modal atau investasi di sektor pertanian daerah, yaitu dengan memperbaiki iklim investasi, antara lain dengan mempermudah perizinan, mengurangi birokrasi, menyediakan data/ informasi mengenai potensi dan peluang investasi sektor agribisnis/ agroindustri serta memperbaiki infrastruktur.

Temuan-Temuan Pokok

- Secara umum capaian realisasi investasi Indonesia Q1-Q3 2020 cukup positif sebesar Rp817,2 triliun atau sebesar 74,8%. Harapannya 25% lagi dapat terealisasi di triwulan ke-4 tahun 2020 ini. Potensi investasi di Jawa dengan di Luar Jawa relatif seimbang. Kita sangat mengandalkan realisasi investasi dari PMDN dimana kesenjangan antara PMDN dan PMA semakin kecil seperti saat kondisi pandemi ini. Jika dirinci per sektor selama 2015-2020, investasi PMA yang terkait sektor pertanian yaitu tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, industri makanan sebesar 11,3% sedangkan PMDN memberikan kontribusi 22,3%. Penanaman Modal (PMA dan PMDN) sektor pertanian sebagian besar terdapat di pulau Kalimantan dan Sumatera. Pada periode 2015 – Semester I 2020, sebagian besar PMA sektor pertanian di Indonesia berasal dari Singapura (45,1%) dan Malaysia (11,2%). Akan tetapi, PMA sektor pertanian dari negara-negara tersebut didominasi oleh investasi pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO).

- Komponen makro yang memengaruhi investasi pertanian adalah infrastruktur awal untuk memulai bisnis dengan nilai faktor 43,7% meliputi infrastruktur jalan nasional (antar provinsi), jalan provinsi (antara kabupaten/kota), dan jalan kabupaten (antar kecamatan). Komponen berikutnya adalah pasokan air, sambungan internet, dan biaya komunikasi terjangkau. Jalan raya, walaupun tidak bebas hambatan, sangat bermanfaat dalam transportasi bahan baku maupun produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Air irigasi maupun air bersih merupakan keperluan produksi pertanian di lapang maupun dalam pengolahan produk turunan. Sambungan internet yang baik dan biaya komunikasi terjangkau akan mengurangi biaya transaksi dan komunikasi. Akselerasi investasi dan akselerasi pemasaran merupakan komponen berikutnya (7,6%) sehingga bila ditambah komponen pertama menjadi 51,3%. Akses pasar, akses modal, stabilitas sosial politik dan perijinan yang cepat sangat dibutuhkan agar investasi berjalan sesuai yang diharapkan.
- Porang. Peluang investasi porang sangat prospektif, baik sebagai komoditas ekspor maupun mensubstitusi tepung porang (tepung konjac) impor. Ekspor porang pada tahun 2019 sebanyak 254 ton, dengan nilai ekspor yang mencapai Rp11,17 Miliar. Investasi Porang di Jawa Timur didukung oleh Pemda Kabupaten Madiun, Nganjuk, Situbondo, dan Trenggalek serta DPMPTSP Prov. Jatim. Investasi dapat dilakukan di hulu maupun hilir. Luas tanam Porang setiap tahun meningkat seiring dengan peningkatan permintaan dunia, tahun 2020 luas tanam Porang di Indonesia mencapai 3.465 ha. Di Jawa Timur, direncanakan penambahan luas tanam Porang tahun 2020 seluas 3.055 ha. Investasi di hulu dapat bekerjasama dengan petani maupun Perhutani. Saat ini di sektor hulu sudah ada investor PT Hongxin Alga yang menargetkan penanaman porang seluas 100 ha di Kab. Situbondo. Di sektor hilir terdapat investor PT Asia Prima Konjac yang merupakan pabrik pengolahan umbi porang menjadi chips dan powder dengan nilai investasi awal Rp20 Miliar. Indonesia juga mengimpor tepung porang untuk kebutuhan industri dalam negeri rata-rata Rp7,4 Miliar atau 42,2 ton per tahun. Kebutuhan tepung porang di dalam negeri juga merupakan suatu peluang investasi.
- Ubi Jalar. Investasi ubi jalar yang dilakukan perlu diarahkan ke penyediaan benih dengan varietas yang sesuai kebutuhan ekspor, pembinaan peningkatan mutu (GAP) dan promosi produk olahan ubi jalar di berbagai event promosi di luar negeri. Investasi di hulu berkompetisi dengan tanaman pokok (padi), karena ubi jalar pada umumnya ditanam setelah padi usai dipanen. Pengolahan ubi jalar menjadi produk-produk yang menarik untuk diekspor baik berupa tepung, keripik dan olahan lain, sudah ada, seperti PT Mekar Indo Buana. Di Jawa Timur, investasi terkait umbi-umbian baik di sektor hulu maupun hilir, sudah ada 7 Perusahaan PMA (dari Korea dan Jepang) dan PMDN yang tersebar di Kabupaten Pasuruan, Mojokerto, Gresik, Lamongan, dan Kota Surabaya. Kebijakan kemudahan investasi sudah ada, investasi dibawah Rp15 Miliar cukup dilakukan oleh Kabupaten/Kota, sedangkan di atas Rp15 Miliar oleh provinsi. Dukungan Pemda sudah ada, misalnya Pemda Kabupaten Blitar, yang memberikan jaminan keamanan berinvestasi, beberapa kabupaten/kota memberikan insentif pembayaran pajak berupa keringanan pajak pada 3 tahun pertama. Indonesia juga mengimpor ubi jalar segar, terutama dari China dan Singapore. Volume impor ubi jalar berfluktuasi, namun cenderung meningkat rata-rata 32,49% per

tahun selama 2015-2019. Impor rata-rata sebesar 19.114 ton per tahun (kurang dari 1% produksi nasional).

- Benih Sayuran. Investasi benih sayuran yang mencetak sukses story, didukung oleh perusahaan benih nasional PMDN yang banyak tumbuh, yang bermitra secara kondusif dengan petani penangkar benih, dan perusahaan benih yang mengkhususkan diri pada penciptaan *Stock Seed* seperti PT Nusa Heulang. Salah satu perusahaan benih PMDN mampu menjalin kemitraan dengan 734 kelompok tani penangkar benih, yang tersebar di 5 provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung dan Bali), di 40 kabupaten. Di Jawa Timur, total produsen benih hortikultura aktif tahun 2020 sebanyak 156 produsen, 46 produsen diantaranya adalah produsen benih sayuran biji (cabe, tomat, sawi, buncis, dll). Dari 42 produsen benih sayuran tersebut, 9 perusahaan sudah mampu melakukan sertifikasi mutu benih (SSM) secara mandiri, yaitu 5 produsen khusus benih hortikultura dan 4 produsen benih tanaman pangan dan hortikultura, dengan lokasi perusahaan di Kabupaten Kediri, Jember, Batu, Malang dan Kota Surabaya. Perusahaan benih yang sudah memiliki ijin SSM pada umumnya sudah memiliki Bagian Riset dan Pengembangan (R & D) yang menghasilkan berbagai inovasi varietas unggul baru yaitu berbagai varietas bersari bebas (open polynated), varietas hibrida, dan varietas *seedless*, yang dihasilkan melalui berbagai teknik seperti *cytoplasmic male sterile*, *gynoceous*, *molecular breeding*, serta *pest and disease resistance screening*. Perusahaan benih PMDN juga mengembangkan Bank Plasma Nutfah untuk mendukung perekayasaan varietas-varietas unggul baru sesuai kebutuhan pasar dengan *quality control* yang sangat ketat. Permasalahan yang dihadapi industri benih PMDN adalah penurunan omzet penjualan benih sebagai dampak Pandemi COVID-19, dan kekhawatiran akibat dihilangkannya pasal 100 UU 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang membawa perubahan yaitu terbukanya investasi benih untuk 100% PMA.
- Kopi.
 - a. Investasi Perbenihan Perkebunan Tanaman Kopi, dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti MoU antara pemerintah Kabupaten dengan Badan Litbang Pertanian, Academy SCOPI, dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.
 - b. Investasi Budidaya dan Pasca Panen Kopi: *Investasi peningkatan produksi* melalui program 1.000 Kampung Kopi di kabupaten Bandung. *Investasi peningkatan daya saing* dalam bisnis kopi oleh Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan *Investasi variasi rasa* dengan lemon, oleh BUMD Agro Jabar (di Cikajang 30 ha, dan di Gunung Tilu Pangalengan 5 ha). *Investasi pupuk organik dan pestisida nabati* oleh petani. yaitu pembuatan pupuk organik dengan starter pupuk hayati dan pestisida nabati dari asap cair yang berasal dari limbah (kulit) kopi. *Inovasi peningkatan kualitas* oleh petani melalui fermentasi kering berupa produk Wine Robusta, dan Luwak Tanpa Luwak, serta *fermentasi basah* (menambahkan aroma citrus pada kopi arabika padahal di perkebunan tidak ada tanaman jeruk). *Investasi promosi atau penyelenggaraan galeri kopi* oleh petani yang diharapkan dapat melipatgandakan/menghasilkan sertifikasi keahlian.

Implikasi Kebijakan

- Dalam mewujudkan strategi peningkatan investasi pertanian diperlukan:
 - a) penguatan lembaga penelitian dalam menciptakan varietas unggul komersial (ubi jalar, benih sayuran);
 - b) penerapan GAP dengan benih varietas unggul (porang, ubi jalar);
 - c) perluasan pasar ekspor (porang, ubi jalar, benih sayuran, kopi);
 - d) dinas pertanian kabupaten/kota agar lebih memperhatikan tanaman sekunder yang memiliki prospek yang baik (seperti porang atau ubi jalar).
- Kebijakan investasi per komoditas ditekankan pada aspek koherensi kebijakan, tata kelola dan lembaga publik, serta kerjasama internasional:
 1. Aspek Koherensi Kebijakan
 - a. Dalam mendukung perijinan investasi melalui *Online Single Submission* (OSS) di BKPM, Kementan perlu menyiapkan arah pengembangan dan fasilitasi komoditas berupa pedoman budidaya yang baik (GAP) dan pedoman pasca panen (*chips* porang, tepung porang dan tepung ubi jalar) serta pengembangan berbagai jenis benih sayuran.
 - b. K/L terkait (Perindustrian, Kesehatan, Perdagangan) perlu menyusun rancangan pengembangan secara terpadu untuk pengembangan produk olahan menjadi chips (porang), tepung (porang, ubi jalar), kopi *specialty*, pengolahan produk lanjutan porang menjadi jelly, agar-agar, lem, tekstil, bahan penunjang kesehatan dan kosmetik.
 2. Aspek Tata Kelola dan Lembaga Publik serta Kerjasama Internasional:
 - a. Kementan perlu menyiapkan bahan input budidaya (porang, ubi jalar, kopi) berupa ketersediaan lahan (di luar pulau Jawa dan optimalisasi lahan Perhutani), benih unggul komersial, pupuk dan sarana prasarana (irigasi, alsintan budidaya untuk porang dan ubi jalar), alsintan pengolahan untuk porang, ubi jalar dan kopi, serta informasi tentang *demand* produk olahan (porang, ubi jalar, kopi) di pasar dunia.
 - b. Kode HS tepung porang belum ada, untuk itu BPS dan Kemenkeu (*Indonesia National Single Window/INSW*) perlu segera menetapkannya.
 - c. Kementan perlu menyiapkan benih sumber yang memenuhi standar perbenihan nasional, serta memenuhi persyaratan pasar (dalam negeri dan pasar ekspor) serta menjalin kerjasama pengelolaan plasma nutfah dengan Universitas dan perusahaan swasta.
 - d. Perguruan Tinggi menyiapkan SDM di bidang ilmu dan teknologi perbenihan hortikultura yang diperlukan perusahaan benih.
 - e. Kemenlu dan Kemendag lebih meningkatkan promosi kopi Indonesia, baik kopi olahan maupun industri makanan dan minuman berbahan baku kopi. Cafe-cafe didorong untuk memanfaatkan kopi *specialty*, menumbuhkan kecintaan terhadap kopi sejak di bangku sekolah (peranan Kemendikbud). Peranan asosiasi produsen/pengusaha/eksportir kopi dioptimalkan.